

ABSTRAK

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memiliki urgensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom dengan penerimaan PBB P2 yang potensial, realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Deli Serdang belum pernah mencapai target sejak pengalihan pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan indikasi masalah yang menyebabkan ketidakefektifan penerimaan PBB P2 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu studi lapangan dan studi dokumen/kepuustakaan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat empat masalah dalam pengelolaan PBB P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu (1) rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya; (2) rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan; (3) rendahnya kompetensi pegawai yang berwenang melakukan penilaian; dan (4) target penerimaan yang ditetapkan terlalu besar.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deli Serdang

ABSTRACT

This research is based on the idea that the Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (Property Tax/PBB P2) has urgency towards Regional Original Income (PAD) for local governments. As an autonomous region with potential PBB P2 revenues, the realization of PBB P2 revenues in Deli Serdang Regency has never reached the target since the transfer of PBB P2 management from the Central Government in 2012. The purpose of this research is to find indications of problems that cause non-optimal PBB P2 revenues managed by Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency. In this research, the authors used two methods, the first one is field studies and the second is document/library studies. Based on the results of the analysis in this research, the authors conclude that there are four problems in the management of PBB P2 by the Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency, namely (1) the low awareness of taxpayers to register their tax objects; (2) low awareness of Taxpayers to pay off arrears; (3) low competence of employees authorized to conduct assessments; and (4) the revenue target set is too large.

Keywords: Land and Building Tax, Property Tax, Regional Revenue Agency, Deli Serdang Regency